

RESISTENSI TOKOH HINDU BALI TERHADAP KELOMPOK SAMPRADAYA HARE KHRISNA DAN SAI BABA DI MEDIA SOSIAL

I Komang Agus Widiantara ^{1*}; I Gusti Ngurah Aan Darmawan ²; I Nyoman Buda Asmara Putra ³; Roni Han Wasisto ⁴; Wayan Supada⁵

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia; awitaraa@gmail.com¹; darmawan.aan@gmail.com²; inyomanbudaasmaraputra29@gmail.com³; ronihanwasisto@gmail.com⁴; wsupada@gmail.com⁵

*Correspondence : awitaraa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika resistensi tokoh Hindu di Bali terhadap kelompok Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba, yang berkembang melalui media sosial di Pulau Bali. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang para tokoh Hindu di Bali yang menolak keberadaan Sampradaya. Artikel ini menggunakan perspektif teori Konflik sosial dalam pandangan Simmel. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi. Data dianalisis menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya penolakan yang dilakukan oleh tokoh Hindu Bali di media sosial. Diantaranya dengan gerakan kampanye kesadaran (*awarness campaigning*), petisi *online*, mobilisasi masa dan kritik melalui *meme*. Resistensi tokoh Hindu Bali juga menyebabkan masyarakat dan kelembagaan terpolarisasi misalnya antara golongan konservatif dan reformis, Parisadha Hindu Dharma dan Majelis Desa Adat, dan kelompok masyarakat adat yang merespon dengan kritis melalui penolakan Hare Krishna dan Sai Baba pada wilayah mereka. Penelitian ini menyarankan agar digelar dialog melalui forum lintas kelompok yang difasilitasi oleh lembaga keagamaan atau pemerintah daerah di Bali.

Kata kunci

Media Sosial, Resistensi, Sampradaya

ABSTRACT

This research examines the dynamics of resistance of Balinese Hindu leaders to the Hare Krishna and Sai Baba Sampradaya groups, which developed through social media on the island of Bali. Using a qualitative approach, this research aims to understand social phenomena from the perspective of Balinese Hindu leaders who reject the existence of Sampradaya. This article uses the perspective of social conflict theory in Simmel's view. Using qualitative research methods with a netnography approach. Data were analyzed using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP). The results showed that various rejection efforts were made by Balinese Hindu leaders on social media. Among them are the awarness campaigning movement, online petitions, mass mobilization and criticism through memes. The resistance of Balinese Hindu leaders also causes society and institutions to be polarized, for example between conservatives and reformists, the Parisadha Hindu Dharma and the Traditional Village Council, and indigenous groups who respond critically through the rejection of Hare Krishna and Sai Baba in their territory. This research suggests that dialogue be held through cross-group forums facilitated by religious institutions or local governments in Bali.

Keywords

Resistance, Sampradaya, Social Media

Pendahuluan

Bali sebagai pulau yang identik dengan agama Hindu, memiliki kekayaan tradisi yang kuat. Namun, dinamika keagamaan di Bali tidak terlepas dari tantangan munculnya berbagai kelompok spiritual bernafaskan Hindu (Sampradaya) yang kadang berbeda dengan aksistensi Hindu tradisional. Termasuk eksistensi kelompok Sampradaya di Indonesia yang sudah dikenal oleh umat Hindu tahun 1970-an (Widiana, 2022). Sampradaya seperti Hare Krishna dan Sai baba muncul di Bali dan membawa ajaran yang berbeda dari tradisi Hindu Bali yang sudah ada. Hal ini menciptakan ketegangan antara pengikut Hare Krishna dan komunitas Hindu tradisional. (Ulum & Firdausi, 2021)

Gerakan dan eksistensi Hare Krishna dan Sai Baba di Bali memperoleh sorotan luas sebelum mendapatkan kritik secara terbuka dan berbagai penolakan di media sosial. Penolakan ini dilatarbelakangi karena berbagai faktor. Mulai dari Sampradaya memiliki ajaran dan praktik yang berbeda dari tradisi Hindu Bali yang sudah mapan, ancaman terhadap keberadaan tradisi oleh perubahan yang dibawa Sampradaya. Aktivitas Sampradaya juga dipandang sulit dalam melakukan integrasi dalam struktur sosial dan budaya lokal seperti di desa adat dan *banjar*. Disamping itu ada kekhawatiran yang sangat besar dari kalangan komunitas Hindu tradisional bahwa ajaran Hare Krishna dapat mempengaruhi generasi muda untuk meninggalkan praktik dan nilai-nilai tradisional. Pengaruh ini dianggap dapat merusak identitas budaya dan spiritual masyarakat Bali di di kemudian hari. (Ulum & Firdausi, 2021; Adi et al., 2023)

Dalam konteks budaya lokal, keberadaan sampradaya juga ditegaskan oleh studi Kuckreja (2022). Menurutnya ada kekhawatiran atas kehadiran Sampradaya yang mampu menyebabkan disrupsi dalam struktur sosial yang telah eksis pada Masyarakat Bali. Komunitas dan tradisi di Bali merasa bahwa ajaran yang berbeda dapat memecah belah kesatuan dan harmoni yang telah ada. Penolakan ini mencerminkan keinginan untuk menjaga stabilitas dan kesatuan dalam Masyarakat. Resistensi terhadap Sampradaya di Bali kemudian meluas dan merambah pada media sosial. Media baru menjadi platform penting untuk mobilisasi dukungan massa, terutama dalam konteks aksi-aksi seperti penolakan Hare Krishna dan Sai baba di forum-forum diskusi media sosial. Media ini memungkinkan penyebaran simbol-simbol Hindu dan narasi yang membentuk identitas Kehinduan baru di kalangan masyarakat, terutama umat Hindu yang melek teknologi (Kurniawan & Alhaq, 2020)

Penelitian ini difokuskan kepada resistensi tokoh-tokoh Hindu di Bali di media sosial terhadap kiprah dan keberadaan Hare Krishna dan Sai Baba selaku kelompok Sampradaya yang memiliki pengikut yang sangat besar. Masifnya penolakan di media sosial terhadap kedua Sampradaya ini pada akhirnya membentuk polarisasi umat Hindu di Bali. Adapun tujuan utama penelitian ini yakni memberikan analisis dan uraian mendalam mengenai dinamika resistensi tokoh Hindu Bali terhadap kelompok Sampradaya di media sosial yang dilakukan dan digerakkan oleh aktor maupun tokoh-tokoh tradisional di Bali yang menilai gerakan Hare Krishna dan Sai Baba mengancam keberadaan tradisi dan budaya Bali. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori konflik sosial dari Simmel. Teori ini akan mengidentifikasi dan membantu menguraikan fenomena penolakan Hare Krishna dan Sai Baba yang dipandang sebagai konflik sosial karena adanya perbedaan dalam tujuan, aspirasi, dan nilai-nilai antar individu. Konflik tersebut muncul karena masing-masing individu memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, sehingga menghasilkan perselisihan dan ketidaksepakatan dalam interaksi sosial.

Penelitian ini sesungguhnya didasari oleh studi sebelumnya. (Gayatri (2021) menyoroti fenomena gerakan masyarakat Hindu menolak pengayoman ideologi dan organisasi transnasional Sampradaya di Parisada Hindu Dharma Indonesia (majelis tertinggi umat Hindu) di Bali. (Ulum & Firdausi, 2021) mengurai benang kusut serta akar sejarah penolakan Sampradaya di Bali sejak tahun 1984 khususnya dari kelompok Hare Krishna. (Kuckreja, 2022) menganalisis eksklusivisme yang dibangun oleh sebagian pengikut Hare Krishna dan Sai Baba membuat tidak nyaman penganut Hindu Bali tradisional. Sementara Widiana (2022) & Dwipayana (2022) menyoroti kelembagaan majelis tertinggi umat Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang tidak serius meredakan penolakan Sampradaya selama ini diberbagai daerah di Indonesia. Meskipun studi sebelumnya mengkaji Sampradaya dengan berbagai perspektif, namun belum dijumpai riset yang melakukan kajian penolakan terkait Hare Krishna dan Sai Baba di media sosial. Sehingga kesenjangan ini akan menjadi ruang bagi penelitian untuk melakukan eksplorasi lebih jauh.

Metode

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam kajian ini untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjektif dan kompleks. Metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kasus penolakan Sampradaya di Bali yakni Hare Krishna dan Sai Baba yang terjadi di media sosial.

Teknik studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini juga akan memberikan bayangan sekaligus petunjuk mengenai mengapa sesuatu bisa terjadi. Namun terlepas dari hal itu, peneliti tetap akan memperhatikan subjek penelitian dan relevansinya. Serta memastikan peneliti dalam pendekatan studi kasus ini, memposisikan diri sebagai *observer* atau pengamat bukan menjadi bagian dari subjek penelitian (Morissan, 2019: 134).

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh Hindu tradisional yang menolak keberadaan sampradaya di Bali. Peneliti mengidentifikasi ada 5 orang informan kunci yang menggerakkan penolakan di media sosial pada akun-akun media sosial, 2 orang informan dari tokoh Hindu yang netral dan 1 orang pengikut Sampradaya. Peneliti dalam memperkuat hasil temuan di lapangan mengumpulkan data dengan wawancara semi terstruktur, observasi dan mengacu Dokumen dengan menganalisis pemberitaan media sosial maupun media *online*.

Menurut Creswell et al., (2007) wawancara memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi pemikiran, perasaan, dan pengalaman partisipan secara bebas dan mendalam. mendalam, peneliti dapat mengeksplorasi pemikiran, perasaan, dan pengalaman partisipan secara bebas dan mendalam. Sementara observasi mendorong peneliti secara aktif terlibat dalam lingkungan partisipan untuk mengamati perilaku dan interaksi sosial. Sedangkan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dikombinasikan dengan metode netnografi yang akan dijadikan panduan dalam membaca sudut pandang para penolak Hare Krishna dan Sai Baba di media sosial. Unggahan konten penolakan Sampradaya pada komunitas virtual facebook Dresta Hindu Bali dan Anti Hare Krishna menjadi ruang analisis. (Eriyanto, 2021).

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP) mulai dari catatan harian, transkrip, coding, kategori, tema dan memos. Peneliti menjadikan rancangan analisis MDAP sebagai rujukan mengingat konsep analisis MDAP

lebih mengakomodasi pemahaman peneliti tentang analisis data yang dilakukan selama ini. Disamping itu *research* partisipatoris MDAP lebih memberikan ruang lebih dan cukup kepada peneliti untuk melakukan pengembangan di lapangan. (Rofiah & Burhan Bungin, 2024)

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Penolakan Sampradaya di Media Sosial

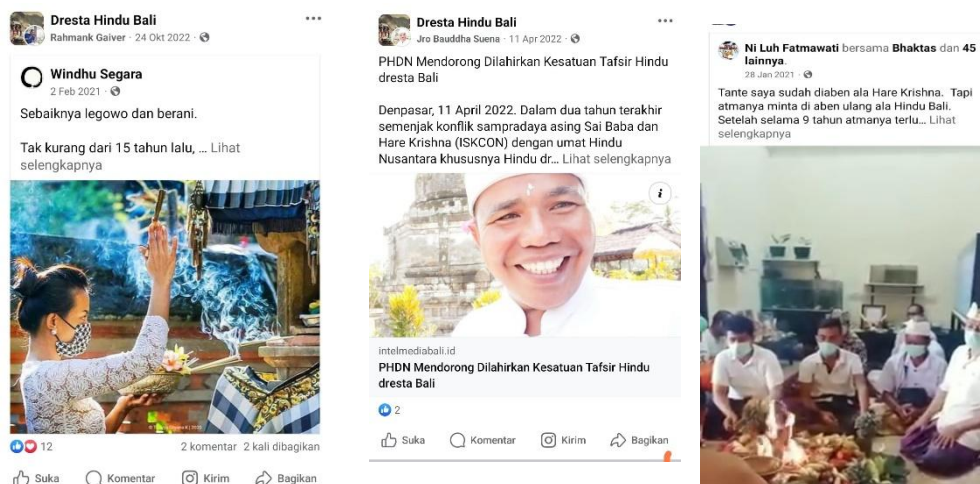
Narasi resistensi yang diamplifikasi di media sosial oleh tokoh-tokoh Hindu Bali tradisional penentang Sampradaya sukses membangun wacana publik mengenai implikasi buruk terhadap keberadaan kelompok spiritual tersebut. Gerakan terorganisir yang dilakukan di media sosial sesungguhnya wujud dari aktivisme digital yang jamak digunakan masyarakat sipil dalam menyampaikan gagasan mereka terhadap sesuatu hal. Aktivisme digital di media sosial telah muncul sebagai alat yang ampuh untuk gerakan sosial, memungkinkan individu dan kelompok untuk memobilisasi, mengatur, dan mengadvokasi perubahan. Fenomena ini telah mengubah aktivisme tradisional dengan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memfasilitasi keterlibatan. (Castillo-Esparcia et al., 2023)

Ada berbagai bentuk penolakan yang dilakukan para tokoh Hindu Bali di media sosial. Komunitas virtual yang dirancang oleh para simpatisan dan kelompok penolak Sampradaya Hare Krisna dan Sai Baba memiliki berbagai strategi dan taktik penolakan sehingga sukses mengun atensi, interaksi (*engagement*) dan aksi umat Hindu di media sosial. Adapun bentuk-bentuk penolakan Sampradaya Hare Krisna dan Sai Baba diuraikan sebagai berikut.

Kampanye Kesadaran (*awareness campaigning*)

Aktivitas membangun kesadaran publik ini dilakukan bertujuan meningkatkan pemahaman suatu isu melalui penyebaran informasi, fakta, statistik, dan edukasi. Aktivistis biasanya menggunakan tagar (#hashtag) khusus untuk memperkuat visibilitas isu dan mengumpulkan dukungan online. (Firamadhina & Krisnani, 2021; Ningrum, 2023; Rahmawan et al., 2020). Tokoh-tokoh Hindu di Bali yang mulai kontra Sampradaya sejak 2019 membangun narasi yang beragam dan edukatif mengenai ajaran-ajaran Hindu di ruang digital. Tudingan dan kritik terbuka yang dilakukan oleh pihak Sampradaya melalui viralnya video-video propaganda penyebaran ajaran Hare Krishna dan Sai baba di media sosial dinilai menjadi ancaman untuk eksistensi tradisi, budaya dan agama di Bali bagi penggiat maupun aktivis *dresta* Bali.

Gambar 1: Kampanye yang dilakukan oleh Tokoh Hindu Bali di media sosial terkait Hare Krishna dan Sai Baba



(Sumber : FB Hindu Dresta Bali)

Resistensi yang dilakukan oleh para aktivis maupun tokoh Hindu bisa dicermati dari unggahan di atas yang dijumpai dalam komunitas virtual (grup) facebook Dresta Hindu Bali. Unggahan berbagai penolakan yang dilakukan sudah dimulai sejak 2021 hingga 2024. Unggahan penolakan tersebut memiliki tematik yang beragam mulai dari mengedukasi proses ritual oleh kelompok Hare Krishna dan Sai Baba, agenda penyebaran ajaran yang dilakukan di pulau Bali, pernyataan sikap para tokoh kontra Sampradaya, hingga testimoni keluarga yang mengikuti dua akelompok Sampradaya tersebut. Ruang-ruang kesadaran yang dilakukan oleh tokoh Hindu di ruang virtual ini memiliki interaksi yang baik antar anggota grup lainnya yang diikuti oleh ribuan umat Hindu dari berbagai kalangan di Indonesia.

Forum diskusi tersebut seolah menjadi ruang dan etalase dialektika dalam mendorong penolakan eksistensi kelompok Sampradaya dari Hare Krishna dan Sai Baba. Dalam unggahan artikel yang disampaikan oleh pemilik akun @Windhu Segara misalnya. Pihaknya menceritakan secara kronologis perjumpaannya dengan pengikut Sampradaya di Bali sejak belasan tahun silam. Pada prinsipnya pengalaman dialektika dan dialog yang pernah ia lakukan bersampanya kelompok Sampradaya memang sulit mencari titik temu, karena antara Sampradaya dan penganut Hindu tradisonal di Bali memiliki sifat, karakter, pemahaman teologi dan praktik ritual yang berbeda.

“Sederhana saja, bila kita memang mau menjalankan keyakinan dengan nyaman, terhindar dari konflik horizontal, ada baiknya sahabat-sahabat yang saat ini tergabung ke dalam garis perguruan Hare Krishna, berbesar hati untuk keluar dari Hindu, untuk selanjutnya mendaftarkan diri ke kementrian agama, entah tampil sebagai agama baru atau masuk ke dalam aliran kepercayaan, toh pemerintah sekarang sudah memberi ruang untuk itu. Bila ini tak dilakukan, tentu perdebatan tak akan pernah usai, yang pada ujungnya hanya menguras energi masing-masing terbuang percuma.” (unggahan @Windhu Segara, 2/2/2021)

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh infoman 1 selaku salah satu tokoh penting dalam penolakan Sampradaya di Bali. Pihaknya menginginkan

agar hare Krishna dan Sai Baba keluar dari komunitas Hindu mengingat perbedaan prinsip dan esensial terhadap kedua keyakinan yang tidak mungkin bisa disatukan antara penganut Hindu Bali dan Kelompok Sampradaya yang eksis selama ini.

“Yah itulah bedanya India dengan Indonesia dan Bali khususnya. Apakah suatu kesombongan menyatakan ajaran Hindu Bali beda dengan Hindu India. Tentu tidak, karena kita mesti meluruskan hal-hal yang tidak lurus akibat dari sama-sama memakai kata Hindu (Wawancara, 19 Juni 2024).

Informan 1 merupakan sosok aktivis dan penggiat isu-isu Hare Krishna dan Sai Baba yang sejak 3 tahun ini konsen dengan penolakan dan membangun diskursus di media sosial. Ia bahkan konsisten membangun dari dan opini publik dengan membagikan haisl pemikiran dan pergulatan antara Sampradaya dan Hindu tradisonal di Bali. Misalnya saja tulisannya yang berjudul “Memahami Perbedaan Bali Dengan India” yang dimuat pada akun facebooknya (19 Juni 2024) dengan gamblang menegasikan Hindu Bali dan India sangat berbeda dalam konsep pemujaan. Hal tersebut tercermin dari masifnya perkembangan sekte-sekte (aliran) yang ada di India.

Jika dicermati, kampanye kesadaran yang dilakukan di media sosial sesungguhnya refleksi dari konflik sosial yang dimediasi media sosial. Wacana penyasaran yang dibentuk oleh para tokoh Hindu bali atas hare Krishna dan Sai Baba terjadi karena perbedaan dalam nilai-nilai dan norma. Hal ini ditegaskan George Simmel dalam teori konflik sosial karena adanya kesenjangan dan perbedaan dalam tujuan, aspirasi, dan nilai-nilai antar individu. Wacana Sampradaya di media sosial tersebut muncul karena masing-masing individu memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, sehingga menghasilkan perselisihan dan ketidaksepakatan dalam interaksi sosial. (Orsini, 2024)

Petisi Online

Mobilisasi opini secara cepat dan masif dan melampaui batasan geografis yang ada. Dengan memanfaatkan platform petisi seperti Change.org dan menyebarkannya di media soal, para kelompok penolak Hare Krishna dan Sai Baba dengan cepat menarik perhatian dari publik secara lebih luas dan mengajak banyak pihak untuk menandatangani petisi. Ini membantu meningkatkan visibilitas dan menyebarkan pesan dengan cara yang jauh lebih efisien dibandingkan metode tradisional. (Alifa et al., 2021; Safitri et al., 2022)

Penolakan terhadap Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba dapat dicermati dari petisi online yang disebarlauskan di kanal-kanal media sosial yang dimuat pada situs charge.org.

Gambar 2. Petisi yang dilakukan oleh kelompok penentang Sampradaya pada situs change.org



(sumber: change.org)

Ada 3 petisi yang disampaikan oleh para aktivis pada petisi *online* populer di Indoensia tersebut. Petisi pertama memuat mengenai ancaman kerukunan yang disebabkan kehadiran ajaran Hare Krishna dan Sai baba yang ditandatangani oleh 3.125 orang. Petisi ini disampaikan oleh salah satu tokoh penolak Sampradaya yang juga menjadi informan 2 pada penelitian ini. Secara substansi, petisi yang ditujukan kepada Presiden RI Joko widodo ini memuat butir-butir kronologis sejarah, kiprah dan agenda Sampradaya yang mendominasi di Indonesia yakni Hare Krishna dan Sai Baba. Pada prinsipnya kedua Sampradaya tersebut menyimpang dari ajaran Hindu yang dikenal di Nusantara dan berpotensi mengganggu harmonisasi antar agama di Indonesia.

Petisi kedua memberikan dukungan moril agar tokoh adat dan budaya di Bali tetap bersuara dalam melakukan penolakan kepada Hare Krishna dan Sai Baba. Petisi ini ditandatangani oleh 319 orang di media sosial. Sementara petisi ketiga memuat tentang dukungan kepada majelis tertinggi umat Hindu yakni Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang baru untuk menjalankan tugas dan roda organisasi dalam mengawal aspirasi umat. Sebagai lembaga pemurnian dan memiliki corak identitas Hindu Bali, para tokoh dan aktivis Hindu Bali bergarap agar penolakan terhadap Sampradaya disuarakan dan dilakukan secara konsisten. Petisi ini ditandatangani oleh 345 orang di media sosial.

Petisi *online* telah menjadi salah satu alat penting dalam gerakan sosial keagamaan di Bali yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang bernaung dalam berbagai organisasi, komunitas, komponen maupun aliansi. Petisi *online* juga dipandang efektif menyuarakan tuntutan atau aspirasi komunitas keagamaan terhadap isu-isu yang mereka pandang sebagai ancaman atau perlunya pengakuan dalam kebijakan publik. Petisi online sebagai bukan semata penolakan komununal di ruang publik tapi juga menemukan kepuasan dan kepentingan pribadi para kelompok Hindu tradisional Bali yang dapat memperkuat identitas dan solidaritas kelompok. (Orsini, 2024)

Mobilisasi Massa

Salah satu kekuatan dari media sosial dalam gerakan aktivisme yang telah terbukti selama ini adalah penggalangan massa di dunia nyata. Ini melibatkan usaha pengorganisasian aksi offline yang disebarluaskan melalui media sosial, seperti protes, demonstrasi, atau pemogokan. Media sosial berperan sebagai alat untuk koordinasi massa dan penyebaran informasi logistik.(Chusna, 2021; Rochmawati et al., 2024). Media sosial sebagai ruang mobilisasi massa bisa dicermati dari unggahan para tokoh Hindu berikut ini.

Gambar 3: Aksi mobilisasi massa untuk menolak Sampradaya di berbagai daerah di Bali.



(Sumber : FB Hindu Dresta Bali)

Gerakan dan penggalangan massa yang telah dilakukan oleh aktor-aktor Hindu tradisional dari berbagai kelompok dan komunitas menunjukkan ruang pergulatan dan eksistensi mereka bahwa upaya yang dilakukan sangat serius. Aksi penutupan secara paksa tempat maupun sekretariat Sampradaya di berbagai lokasi di Bali, menjadi unggahan dalam setiap pergerakan di kanal-kanal media sosial. Para tokoh Hindu dengan luhur dan kreatif memainkan isu dan basis wacana di media sosial ditunjukkan saat mereka tergabung dalam aliansi Hindu yang melakukan demonstrasi di ruang publik. Mereka juga mendatangi kantor Pemerintahan dan DPRD Bali pada 25 Oktober 2021 yang digerakkan oleh Aliansi Hindu Nusantara (AHN) yang sebagian besar merupakan elit dan para tokoh aktivisme digital di ruang maya. Perlawanan budaya yang dipanggungkan di ruang nyata sebagai simbol penolakan Sampradaya budaya memberikan pesan yang sangat kuat seolah Bali tidak membutuhkan Sampradaya . (denpost.id, 25 /10/2021).

Meme : Lelucun, Kritik dan Satire

Menyampaikan pesan, membentuk opini, atau sekadar hiburan merupakan karakter khas *meme* di media sosial dalam mengkritisi fenomena . Secara teori, meme bisa didekati atau menggambarkan tiga komponen, yakni manifestasi (*manifestation*), kebiasaan (*behavior*), dan keidealan(Davison, 2012). Dengan mencermati fenomena meme dan ruang public di media sosial, nampaknya meme Sampradaya dijadikan instrumen kritik bagi para aktivis media sosial yang kontra atas keberadaan Hare Krishna dan Sai Baba. Kritik-kritik yang dibangun bisa dijumpai dari berbagai jenis meme di media sosial. Meme tersebut penulis rangkum sebagai berikut.

Gambar 4: meme kritis dan satir terhadap kiprah Sampradaya di Bali.



(Sumber : FB Hindu Dresta Bali)

Meme yang disebarluaskan para penentang Sampradaya di media sosial sesungguhnya untuk untuk mengonstruksi, dan memperkuat realitas atau fenomena sosial penolakan Hare Krishna dan Sai Baba. Meme dipercaya sebagai bentuk ekspresi budaya yang unik dalam lingkungan digital, di mana aspek-aspek tertentu dari masyarakat, tokoh maupun aktivis Hindu di Bali dan identitas sering kali dimanifestasikan melalui humor, sindiran, dan visualisasi yang sederhana namun kuat. Penggunaan meme dalam aktivisme di media sosial menurut kelompok kontra Sampradaya diuraikan oleh Informan 3. Menurutnya meme menjadi instrumen efektif untuk membangkitkan kesadaran dengan cara sederhana bagi umat Hindu yang kurang paham dan tidak mengikuti isu penolakan Sampradaya di Bali.

“Meme menjadi konten yang efektif mengedukasi umat Hindu agar sadar bahwa Hare Krishna dan Sai Baba berdampak buruk terhadap eksistensi Hindu dan Budaya Bali di masa depan. Meme yang dirancang kreatif oleh tim-tim kreatif para aktivis di media sosial memuat pesan-pesan yang esensi. Menurut kami, tidak semata menolak namun juga memberikan pemahaman kepada umat Hindu secara luas.” (wawancara informan 3, 20 Juni 2024)

Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa penyebaran meme yang mengomentari isu-isu Hare Krishna dan Sai Baba secara konsisten dapat menormalisasi pandangan atau asumsi tertentu tentang fenomena penolakan yang dilakukan oleh tokoh Hindu Bali. Meme sekaligus menjadi cara ampuh untuk mengkritik dan secara implisit atau satir. Banyak meme digunakan untuk menyoroti ketidakpuasan, dalam hal ini eksistensi Sampradaya di Pulau Bali. Kompleksnya isu dalam penolakan Hare Krishna dan Sai Baba juga efektif dalam menyederhanakan konsep atau masalah yang rumit menjadi visual atau kalimat pendek yang mudah dipahami dan diterima audiens luas dalam hal ini umat Hindu di media **sosial**. (Dewi, 2019)

Polarisasi dan Dampak Resistensi Terhadap Sampradaya

Resistensi tokoh Hindu Bali terhadap kelompok Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba di media sosial menimbulkan berbagai dampak bagi umat Hindu. Media sosial telah menjadi platform yang kuat untuk menyuarakan pendapat, memperjuangkan kepercayaan, dan memperkuat identitas kelompok. Namun, dalam beberapa kasus, penggunaan media sosial juga bisa membawa dampak negatif yang signifikan, terutama ketika digunakan untuk resistensi terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Hal ini terjadi dalam konteks resistensi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Hindu Bali terhadap kelompok Sampradaya yang melahirkan berbagai polarisasi.

Polarisasi antara Hindu tradisional di Bali dengan kelompok Sampradaya dari Hare Krishna dan Sai Baba. Tokoh-tokoh Hindu tradisional di Bali sering melihat *Sampradaya* sebagai ancaman terhadap tradisi Hindu Bali yang unik, yang menggabungkan unsur-unsur Hindu dan adat lokal. Penolakan ini kerap kali didasarkan pada argumen bahwa *Sampradaya* tertentu memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan ritual, tata cara, dan nilai-nilai tradisional Hindu Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seperti hasil pengamatan dengan informan 5 ini.

“Aliran atau *Sampradaya* yang berasal dari luar Bali, terutama yang memiliki pengaruh dari India seperti Sai Baba, Hare Krishna, atau lainnya, dianggap oleh sebagian kalangan sebagai ‘asing’ dan potensial menggeser struktur adat serta praktik keagamaan lokal.” Wacana antara Hindu Bali dan Hindu Sampradaya di media sosial sangat menyedihkan karena saling kritik, menghina dan menjatuhkan sering dimunculkan dalam perdebatan tersebut. Tentu hal ini sangat memperhatikan. Seharusnya nilai-nilai perdamaian yang ditonjolkan bukan sebaliknya. (wawancara, 28 Juli 2024)

Perpecahan dalam komunitas Hindu Bali dan kelompok Sampradaya meskipun terjadi antar elit dan para tokoh, hal ini mendorong sekaligus menciptakan kesenjangan dan memperkuat pemisahan antara kedua kelompok tersebut. Polarisasi lainnya juga terjadi khususnya pada komunitas (internal) Hindu Bali sendiri. Tercermin dari hasil wawancara dengan informan 6 yang mengakui bahwa munculnya kelompok-kelompok yang mendukung modernisasi atau pembaruan keagamaan, termasuk penerimaan *Sampradaya* sebagai bagian dari perkembangan ajaran Hindu yang global. Di sisi lain,

kelompok yang lebih konservatif melihat bahwa Sampradaya berisiko menodai kemurnian ajaran Hindu Bali.

Polarisasi ini menciptakan dua kubu, yaitu kelompok reformis yang lebih terbuka terhadap integrasi aliran baru, dan kelompok tradisionalis yang menentang perubahan, menganggap praktik asing ini sebagai bentuk penyimpangan atau bahkan “kontaminasi” dari luar. Pernyataan tersebut juga terkonfirmasi oleh informan 7 dan 8 yang menyatakan bahwa polarisasi yang terjadi merespon keberadaan Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba melahirkan kelompok pro maupun kontra. Kedua kelompok tersebut dipandang merepresentasikan Hindu tradisional konservatif dan reformis moderen. Meskipun demikian 7 dan 8 merasa tidak keberatan dengan keberadaan sampradaya.

“Meskipun kami bukan dari dari kelompok Hare Krishna dan Sai Baba, kami menerima aliran lainnya yang bernafas Hindu di Bali namun dengan ketentuan saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Intinya, jangan bertingkah dan berulah aneh-aneh, apalagi menghina tradisi Hindu Bali. Itu yang tidak elok dipandang sebagai umat beragama. Prinsip keyakinan dan beragama itu adalah perdamaian, harmonis dan saling menghargai. Kalau sebaliknya, kami kira hal itu tidak sejalan dengan intisari kepercayaan apapun.” (wawancara, 28 Juli 2024)

Informan 7 dan 8 sebagai representasi dari kelompok pemuda Hindu di Bali kecenderungan memiliki gagasan yang terbuka dan *open minded* dalam merespon Sampradaya. Menurut mereka kepercayaan apapun di seluruh dunia saat ini mustahil untuk tidak terpengaruhi oleh akses nilai, budaya, karakter dan dinamika sosial lainnya. Namun informan 7 dan 8 menegaskan kembali bahwa jati diri dan karakteristik Hindu Nusantara harus tetap dirawat dan dilestarikan ditengah gempuran berbagai kepercayaan lainnya yang terus berkembang seiring dinamika zaman dan pola komunikasi manusia modern. Pandangan dari kelompok muda ini tentu berbeda dengan kelompok tua maupun tokoh Hindu tradisional di Bali yang memiliki prinsip yang sulit untuk konservatif menilai bahwa Sampradaya mengaburkan identitas Hindu Bali yang khas. Mereka khawatir jika generasi muda semakin jauh dari ajaran leluhur dan lebih memilih ritual serta ajaran yang dianggap asing.

Polarisasi lainnya juga bisa dijumpai pada lembaga adat dan agama yakni Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali. Meskipun memiliki komitmen untuk menolak ruang gerak Hare Krishna dan Sai Baba melalui keputusan bersama yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali. Namun kritikan kepada PHDI Bali pada masa lampau mempengaruhi legitimasi kelembagaan tersebut. PHDI dituding memiliki afiliasi khusus dengan para tokoh Hare Krishna dan Sai Baba sehingga kiprah kedua Sampradaya terbesar di Indonesia ini masih tetap eksis di Bali. PHDI dipandang memberikan akses dan ruang kepada para tokoh-tokoh Sampradaya untuk memperoleh pengakuan melalui forum-forum keumatan hingga mengakomodir kepentingan Sampradaya di Indonesia secara legitimasi. Upaya inilah yang mendorong tokoh-tokoh MDA dan elit Hindu kontra Sampradaya mengakomodir pembentukan kelahiran PHDI yang merupakan hasil dari Musyawarah Luar Biasa (MLB). Seperti pernyataan Informan 1 berikut.

“PHDI Pemurnian terbentuk dari Musyawarah Luar Biasa (MLB) ini lahir dari PHDI sebelumnya yang memberikan panggung kepada Sampradaya untuk berkembang di Indonesia. Padahal keberadaan mereka sudah ditolak baik secara organisasi maupun

buku-buku terbitan Hare Krishna dan Sai Baba juga dilarang terbit melalui SK Kejaksaan Agung RI Nomor:Kep-107/J.A/5/1984. Kami menyayangkan beberapa tokoh PHDI terpapar ajaran Sampradaya. Kami menganggap eksistensi mereka mengancam akar dari tradisi, ritual dan agama sesuai dengan *dresta* (aturan) di Bali. Sehingga kami memandang penting kehadiran PHDI Pemurnian sebagai majelis keumatan yang sah sesuai aturan organisasi dan memiliki posisi yang jelas untuk menolak keberadaan Hare Krishna dan Sai Baba di Bali." (Wawancara, 27/7/2024).

Kelahiran PHDI pemurnian merupakan bentuk dari polarisasi atas penolakan para tokoh Hindu yang tidak bisa dibendung. PHDI pemurnian dipandang sebagai alat perjuangan untuk menggerakkan dan mempertahankan orisinalitas Hindu Nusantara dari "ekspansi" Hare Krishna dan Sai Baba yang sudah meluas di Indonesia. Polarisasi yang terjadi tidak semata menyentuh lembaga adat dan agama. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga didorong mendukung gerakan penolakan tersebut. Pemerintah diharapkan terlibat dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan dengan mengambil sikap dalam polemik ini. Ada tekanan dari pihak-pihak yang konservatif agar pemerintah lebih mengatur atau membatasi aktivitas *Sampradaya* di Bali, dengan dalih menjaga "kemurnian" ajaran Hindu Bali.

"Untuk itu saya menyambut baik terbitnya Keputusan Bersama Tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali sebagai jawaban atas aspirasi dan harapan Krama Bali yang telah muncul sejak lama tanpa ada kepastian jawaban. Sangat menghormati dan mendukung terbitnya Keputusan Bersama (PHDI dan MDA) dalam mewujudkan tatanan kehidupan *Krama* Hindu di Bali yang rukun, damai, dan tertib yang telah terbangun dan mengakar selama berabad-abad berdasarkan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Tatanan kehidupan inilah yang sesungguhnya merupakan jati diri asli Krama Bali (Genuine Bali)," tambah Gubernur dari Desa Tua di Sembiran, Buleleng ini. (radarbali.jawapos.com, 20/12/2020)

Implikasi penolakan Sampradaya juga melahirkan polarisasi di desa adat. Tokoh-tokoh adat di Bali yang tersebar di berbagai wilayah seperti Denpasar, Karangasem, Buleleng, Badung dan Tabanan serempak melakukan penolakan terhadap Hare Krishna dan Sai Baba. Penolakan yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Sampradaya di wilayah desa adat. Keputusan ini menegaskan pula peran dan dari desa adat yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka, termasuk penegakan hukum terkait ritual Sampradaya.

Kesimpulan

Resistensi tokoh Hindu Bali terhadap kelompok Sampradaya, seperti Hare Krishna dan Sai Baba, telah menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat Hindu Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya penolakan yang dilakukan oleh tokoh Hindu Bali di media sosial. Diantaranya melakukan gerakan kampanye kesadaran (awareness campaign), petisi online, mobilisasi masa dan kritik melalui beragam *meme*. Resistensi tokoh Hindu Bali juga menyebabkan masyarakat dan kelembagaan terpolarisasi misalnya antara golongan konservatif dan reformis, Parisadha Hindu Dharma dan Majelis Desa Adat, dan kelompok masyarakat adat yang merespon dengan kritis melalui penolakan Hare Krishna dan Sai Baba pada wilayah mereka. Penelitian ini

menyarankan pentingnya digelar dialog melalui forum lintas kelompok yang difasilitasi oleh lembaga keagamaan atau pemerintah daerah di Bali.

Keterbatasan penelitian ini mencakup metode pengumpulan data, seperti keterbatasan aksesibilitas terhadap responden kunci serta kendala dalam memperoleh informasi yang mendalam mengenai dinamika penolakan Sampradaya yang berlanjut sampai saat ini khususnya dalam diskursus yang terjadi di media sosial. Dalam penelitian masa depan dianjurkan agar menggunakan pendekatan campuran untuk mengumpulkan data dan informasi valid akan implikasi yang terjadi akibat resistensi Sampradaya. Penelitian berikutnya diharapkan mengeksplorasi lebih jauh mengenai upaya resiliensi atau keberlanjutan Hare Krishna dan Sai Baba di tengah resistensi yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak saja di Bali namun di berbagai daerah di Indonesia

Referensi

- Adi, A., Made Suastra, I., Gde, I. B., Triguna, Y., Bagus, I., Pujaastawa, G., Palangka, I., & Kalimantan, R.-C. (2023). The Controversy Over Sampradaya And The Dynamics Of Hindu Institution: Contestation Of Hindu Elites In Palangka Raya City. *DOAJ Indexed*, 16, 43–56. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/43>
- Castillo-Esparcia, A., Caro-Castaño, L., & Almansa-Martínez, A. (2023). Evolution of digital activism on social media: opportunities and challenges. *El Profesional de La Información*. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.03>
- Chusna, A. (2021). Gerakan #dirumahaja sebagai Aktivisme Digital pada Akun Media Sosial Najwa Shihab. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 124–132. <https://doi.org/10.51135/kambotivol1issue2page124-132>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Davison. (2012). *The language of internet me- mes. The social media reader*.
- Dewi, R. S. (2019). Kreator Meme dan Konstruksi Makna Meme Politik di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.24815/jkg.v8i1.13332>
- Eriyanto. (2021). *Metode netnografi: Pendekatan kualitatif dalam memahami budaya pengguna media sosial* (1st ed). Rosda.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 199. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>
- Widiana, I.G.P.G.(2022). *Dinamika Sampradaya Di Bali* (Vol. 13, Issue 1). www.hinduism.co.za
- Gayatri, I.A.M. (2021). Gerakan Masyarakat Hindu Menolak Pengayoman Ideologi Dan Organisasi Transnasional Sampradaya Di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). *Dharmasmrti*, 21(1).
- Kuckreja, R. (2022). The Hare Krishnas in Bali: Localized Religion and New Religious Movement. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.15642/religio.v12i1.1857>
- Kurniawan, A., & Alhaq, A. (2020, February 13). *Muslimness Discourse, Religious Authority, and Cyber-Media Activism in Contemporary Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291731>
- Ningrum. (2023). Opini Publik Pada Aktivisme Tanda Pagar ‘#’ Di Media Sosial Twitter (Social Network Analysis Dan Sentiment Analysis Pengguna Twitter Terhadap #Sayabersamajokowi). *BroadComm*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v5i2.328>

- Orsini, A. (2024). Georg Simmel. In *Sociological Theory* (pp. 245–279). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-52539-1_8
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, P. A. (2020). Strategi aktivisme digital di Indonesia: aksesibilitas, visibilitas, popularitas dan ekosistem aktivisme. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522>
- Rochmawati, A., Syarifah Alamiyah, S., & kunci, K. (2024). *Aktivisme Media Sosial di Instagram: Studi Literatur*. <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Rofiah, C., & Burhan Bungin. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. *Develop*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319>
- Safitri, N., Tjiptabudy, J., & Piris, H. J. (2022). Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(6), 631–640. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>
- Ulum, R., & Firdausi, L. (2021). Resistance of Hindu Traditionalist Against Sampradaya Hare Krishna Bali. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 6(02), 235–252. <https://doi.org/10.18784/analisa.v6i02.1432>